

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO MELALUI PROGRAM INKUBASI BISNIS DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

Rakhly Wahyu Hidayat, Neny Marlina

Email: rakhlywahyu123@gmail.com , nenymarlina@live.undip.ac.id

Departemen Politik dan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Jl. Prof. Soedarto, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah

Kode Pos 50319 Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 74654505

Laman: <https://fisip.undip.ac.id/id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Pemberdayaan usaha mikro merupakan salah satu strategi pemerintah dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dan memperkuat pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan pemberdayaan usaha mikro melalui Program Inkubasi Bisnis dengan tujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam aspek produksi, manajemen, legalitas, branding, dan pemasaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Inkubasi Bisnis di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pelaksanaan program.

Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen, pemerintah daerah, serta pelaku usaha mikro peserta program. Analisis menggunakan teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle yang melihat implementasi melalui *Content of Policy* dan *Context of Implementation*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup baik dalam memberikan manfaat kepada pelaku usaha mikro melalui peningkatan kualitas produk, perbaikan kemasan, penguatan identitas usaha, fasilitasi legalitas, serta peningkatan kemampuan pengelolaan usaha. Namun implementasi masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, kuota peserta, kemampuan digital, fasilitas pendukung, dan kebutuhan pendampingan pascaprogram. Temuan penelitian menunjukkan pentingnya penguatan keberlanjutan program agar pemberdayaan usaha mikro tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan, tetapi mampu menciptakan perubahan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Usaha Mikro, Inkubasi Bisnis, Merilee S. Grindle, Kabupaten Kebumen.

ABSTRACT

Micro-enterprise empowerment is an important government strategy to strengthen community economic capacity and regional development. The Kebumen Regency Government implemented the Business Incubation Program as a policy instrument to improve micro-enterprise capabilities in production, management, legality, branding, and marketing. This study aims to analyze the implementation of the Business Incubation Program policy in Kebumen Regency in 2025.

This research uses a qualitative descriptive method through interviews, observation, and documentation. The analysis applies Merilee S. Grindle's policy implementation theory consisting of Content of Policy and Context of Implementation. The results indicate that the program has provided benefits through product improvement, packaging development, business identity strengthening, legality facilitation, and managerial improvement. However, implementation still faces challenges related to budget limitations, human resources, participant capacity, digital capability, infrastructure, and continuous mentoring.

Keywords: Policy Implementation, Micro-enterprise Empowerment, Business Incubation Program, Merilee S. Grindle.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga bagaimana pemerintah mampu menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat meningkatkan kapasitas ekonominya. Dalam konteks tersebut, usaha mikro memiliki posisi strategis karena menjadi sektor ekonomi yang dekat dengan masyarakat serta mampu menyediakan ruang usaha bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan modal.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro melalui berbagai regulasi dan program pemberdayaan. Kebijakan pemberdayaan UMKM diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang mendukung, meningkatkan kemampuan manajerial, memperluas akses pasar, serta meningkatkan daya saing usaha.

Kabupaten Kebumen merupakan salah satu daerah yang mengembangkan Program Inkubasi Bisnis sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam meningkatkan kualitas usaha mikro. Program ini dirancang untuk memberikan pendampingan secara sistematis melalui pelatihan, mentoring, pengembangan produk, dan penguatan aspek usaha.

Meskipun program telah berjalan, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan program, tetapi juga dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan

diterjemahkan oleh pelaksana, bagaimana sumber daya tersedia, serta bagaimana kelompok sasaran menerima manfaat program.

Berdasarkan kondisi tersebut penelitian ini berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami proses implementasi kebijakan secara mendalam berdasarkan pengalaman aktor yang terlibat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan purposive sampling yang terdiri dari perangkat daerah pelaksana program dan pelaku usaha mikro penerima manfaat.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian menggunakan teori Merilee S. Grindle yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of Implementation* sebagai kerangka analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen Tahun 2025 telah memberikan perubahan terhadap kapasitas pelaku usaha mikro. Pada aspek *Content of*

Policy, program memiliki tujuan yang jelas yaitu meningkatkan kemampuan usaha mikro agar lebih produktif dan memiliki daya saing.

Dari sisi manfaat kebijakan, peserta memperoleh peningkatan kemampuan dalam pengelolaan usaha, pengembangan produk, perbaikan kemasan, serta pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha. Program juga memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk mengenal strategi pemasaran yang lebih luas.

Namun, implementasi program masih menghadapi beberapa kendala. Keterbatasan anggaran menyebabkan jumlah peserta yang dapat menerima manfaat masih terbatas. Selain itu, kemampuan digital sebagian pelaku usaha masih menjadi tantangan dalam pengembangan pemasaran berbasis teknologi.

Pada dimensi *Context of Implementation*, keberhasilan program dipengaruhi oleh koordinasi antaraktor, kapasitas organisasi pelaksana, serta dukungan lingkungan sosial. Pelaksana program telah menjalankan fungsi koordinasi, tetapi penguatan monitoring dan pendampingan setelah program masih diperlukan.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemberdayaan tidak cukup dilakukan melalui pelatihan singkat. Program perlu diarahkan pada proses berkelanjutan agar perubahan kapasitas usaha dapat bertahan dalam jangka panjang.

KESIMPULAN

Implementasi Kebijakan Program Pemberdayaan Usaha Mikro melalui Program Inkubasi Bisnis di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 secara umum telah berjalan cukup baik. Program mampu memberikan manfaat melalui peningkatan kualitas produk, penguatan identitas usaha, fasilitasi legalitas, dan peningkatan kemampuan pengelolaan usaha.

Namun, implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya, anggaran, kemampuan digital, serta kebutuhan

pendampingan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Kebumen perlu memperkuat keberlanjutan program melalui peningkatan dukungan anggaran, perluasan peserta, penguatan kapasitas pelaksana, dan evaluasi pascaprogram.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Pengembangan) Implementasi Berdasarkan *Dimensi Content of Policy*

Berdasarkan perspektif Merilee S. Grindle, dimensi *Content of Policy* melihat bagaimana isi suatu kebijakan dirancang dan diterjemahkan dalam pelaksanaan. Pada Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen Tahun 2025, isi kebijakan menunjukkan bahwa pemerintah memiliki perhatian terhadap peningkatan kapasitas usaha mikro melalui intervensi yang lebih terarah. Program tidak hanya memberikan pelatihan teknis, tetapi juga mencakup pendampingan pengembangan produk, perbaikan kemasan, penguatan identitas merek, fasilitasi legalitas usaha, serta peningkatan kemampuan pemasaran.

Dari sisi kepentingan kelompok sasaran, program dirancang untuk menjawab kebutuhan pelaku usaha mikro yang masih menghadapi berbagai keterbatasan, seperti rendahnya kemampuan manajemen usaha, keterbatasan akses pasar, dan lemahnya pengembangan produk. Kehadiran program memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh pengetahuan baru yang sebelumnya sulit diperoleh secara mandiri.

Manfaat kebijakan terlihat dari perubahan yang dirasakan oleh peserta program. Pelaku usaha mengalami peningkatan pemahaman mengenai pentingnya kualitas produk, desain kemasan, pengelolaan usaha, dan strategi pemasaran. Dengan demikian, program tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan, tetapi berusaha membangun kapasitas pelaku usaha agar lebih mandiri.

Namun demikian, manfaat program belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh pelaku usaha mikro di Kabupaten Kebumen. Keterbatasan

jumlah peserta menyebabkan masih terdapat pelaku usaha yang belum memperoleh kesempatan mengikuti program. Hal tersebut menunjukkan bahwa perluasan cakupan program menjadi aspek penting dalam keberlanjutan kebijakan.

Implementasi Berdasarkan Dimensi *Context of Implementation*

Dimensi *Context of Implementation* berkaitan dengan lingkungan pelaksanaan kebijakan, karakteristik lembaga pelaksana, hubungan antaraktor, dan kondisi sosial yang memengaruhi implementasi. Dalam pelaksanaan Program Inkubasi Bisnis, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen memiliki peran utama sebagai pelaksana kebijakan.

Koordinasi antara pemerintah daerah, pendamping, mentor, dan pelaku usaha menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk membangun hubungan kolaboratif melalui proses seleksi, pelatihan, dan pendampingan.

Meskipun demikian, lingkungan implementasi juga menghadirkan sejumlah tantangan. Sebagian pelaku usaha mikro masih memiliki keterbatasan waktu untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan karena harus membagi perhatian antara aktivitas produksi dan program pendampingan. Selain itu, kemampuan penggunaan teknologi digital yang belum merata menyebabkan sebagian peserta membutuhkan pendampingan lebih intensif.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan usaha mikro membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Program inkubasi tidak cukup berhenti pada tahap pelatihan awal, tetapi memerlukan monitoring, evaluasi, serta pendampingan setelah program selesai.

Faktor Penghambat Implementasi Program Inkubasi Bisnis

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi Program Inkubasi Bisnis Kabupaten Kebumen

Tahun 2025. Faktor pertama adalah keterbatasan sumber daya anggaran. Ketersediaan anggaran berpengaruh terhadap jumlah peserta, intensitas kegiatan, serta keberlanjutan pendampingan.

Faktor kedua adalah keterbatasan kapasitas sumber daya manusia. Tidak seluruh pelaku usaha memiliki kemampuan yang sama dalam memahami materi pelatihan, khususnya berkaitan dengan pemasaran digital dan pengembangan usaha berbasis teknologi.

Faktor ketiga adalah keterbatasan pendampingan pascaprogram. Setelah mengikuti kegiatan inkubasi, pelaku usaha masih membutuhkan arahan agar pengetahuan yang diperoleh dapat diterapkan secara konsisten dalam kegiatan usaha.

Oleh karena itu, peningkatan efektivitas program membutuhkan strategi yang lebih berkelanjutan melalui penguatan kelembagaan inkubator bisnis, peningkatan kapasitas mentor, serta pembangunan sistem evaluasi perkembangan usaha peserta.

DAFTAR PUSTAKA

Grindle, M. S. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton: Princeton University Press.

Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach*. New York: Routledge.

Nugroho, R. (2017). *Public Policy: Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2023). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.

Wahyuningsih, et al. (2022). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota Surabaya